

**Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System, dan Kompetensi Pegawai Terhadap Pencegahan Fraud dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi**

**Rici Marini<sup>1</sup>, Muhsin<sup>2</sup>, Helisa Noviarty<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Tanjungpura, Indonesia

<sup>1</sup>ricimarini@gmail.com, <sup>2</sup>muhsinekonomi@untan.ac.id, <sup>3</sup>helisanoviar@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effect of internal control, whistleblowing system, and employee competence on fraud prevention efforts, and evaluate the role of individual morality as a moderating variable. The background of this study is based on the high number of fraud cases in the public sector, which indicates that the supervisory system and individual ethics are not optimal. The research was conducted at the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) of West Kalimantan Province using an explanatory quantitative approach. Primary data was collected through distributing questionnaires to 36 purposively selected respondents. Data analysis was conducted by utilizing WarpPLS 8.0 software to test the direct relationship between variables as well as the moderating effect of individual morality. The results of the analysis show that internal control and whistleblowing system have a positive and significant effect on fraud prevention. In contrast, employee competence does not show a significant effect. In addition, individual morality is proven to strengthen the effect of internal control on fraud prevention, but does not strengthen the effect of the whistleblowing system or employee competence. These findings emphasize that the effectiveness of the supervisory system needs to be supported by individual moral integrity to optimally prevent fraud. This research is expected to make an empirical contribution in strengthening the supervisory system in the public sector and in shaping a clean organizational culture and integrity.*

**Keywords:** Fraud Prevention, Internal Control, Whistleblowing system, Employee Competence, Individual Morality

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal, sistem *whistleblowing*, dan kompetensi pegawai terhadap upaya pencegahan *fraud*, serta mengevaluasi peran moralitas individu sebagai variabel moderasi. Latar belakang dari studi ini didasarkan pada masih tingginya kasus *fraud* di sektor publik, yang mengindikasikan belum optimalnya sistem pengawasan maupun etika individu. Penelitian dilaksanakan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 36 responden yang dipilih secara *purposive*. Analisis data dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak WarpPLS 8.0 untuk menguji hubungan langsung antar variabel serta pengaruh moderasi dari moralitas individu. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengendalian internal dan sistem *whistleblowing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Sebaliknya, kompetensi pegawai tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Selain itu, moralitas individu terbukti memperkuat

pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*, namun tidak memperkuat pengaruh *whistleblowing system* maupun kompetensi pegawai. Temuan ini menekankan bahwa efektivitas sistem pengawasan perlu didukung oleh integritas moral individu guna mencegah *fraud* secara optimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam penguatan sistem pengawasan di sektor publik dan dalam membentuk budaya organisasi yang bersih serta berintegritas.

**Kata kunci:** Pencegahan *Fraud*, Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, Kompetensi Pegawai, Moralitas Individu

## PENDAHULUAN

*Fraud* atau kecurangan adalah tindakan yang disengaja dan melanggar hukum dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau kelompok, yang akhirnya menyebabkan kerugian bagi organisasi, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial (Mardianto & Tiono, 2019). Secara global, angka kasus *fraud* menunjukkan kecenderungan meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan laporan Asia-Pacific Occupational Fraud 2022 yang diterbitkan oleh ACFE, Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara dengan jumlah kasus *fraud* terbanyak di wilayah Asia Pasifik, dengan total 23 kasus pada tahun 2022. Dari total tersebut, 64% merupakan kasus korupsi, 28,9% terkait penyalahgunaan aset milik negara atau perusahaan, dan 6,7% merupakan kasus manipulasi laporan keuangan (ACFE, 2022; Kompas). Data ini menunjukkan bahwa *fraud* tidak hanya menjadi isu di sektor swasta, melainkan juga telah menyebar ke sektor publik, termasuk lembaga pemerintahan.

Di sektor perbankan, kecurangan dalam bentuk penggelapan dana oleh pegawai masih sering terjadi. Antara News (2022) melaporkan sebuah kasus yang melibatkan mantan karyawan Bank Sultra, yang terbukti menyelewengkan dana nasabah sebesar Rp 1,9 miliar dari 107 rekening yang terdiri atas rekening individu, institusi pendidikan, dan lembaga kemasyarakatan. Berdasarkan temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tindakan tersebut dilakukan secara sistematis dan terorganisir, sehingga mengakibatkan kerugian besar baik bagi nasabah maupun lembaga keuangan terkait (Anggoe & Reskino, 2023). Kejadian serupa juga terjadi dalam layanan publik, seperti di sektor kesehatan. Penelitian Suhartono et al., 2023 menemukan adanya penyimpangan anggaran di RSUD Lasinrang, Kabupaten Pinrang. Misalnya, pelatihan yang dijadwalkan berlangsung selama tujuh hari ternyata hanya dilaksanakan selama dua hingga tiga jam, namun laporan pertanggungjawaban tetap disusun seolah-olah kegiatan tersebut telah berlangsung penuh. Selain itu, terdapat indikasi penyalahgunaan dana rumah sakit oleh pegawai untuk kepentingan pribadi, seperti liburan, yang menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi aktual. Temuan ini menunjukkan lemahnya pengendalian internal serta rendahnya tingkat moralitas individu pegawai, yang pada akhirnya menciptakan celah terjadinya *fraud* (Suhartono et al., 2023).

Tingginya angka *fraud* di sektor publik menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan pengendalian internal yang telah diterapkan belum berjalan secara optimal. Hal ini menjadi tantangan serius bagi instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola keuangan negara secara akuntabel dan transparan. Oleh karena itu, penelitian mengenai pencegahan *fraud* di lingkungan instansi pemerintah menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian semacam ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem pengendalian internal serta membangun integritas organisasi guna meminimalisasi risiko terjadinya *fraud* di sektor publik. Untuk mendukung praktik keuangan yang transparan dan bertanggung jawab, BPKP Provinsi Kalimantan Barat perlu mengkaji secara mendalam hubungan antara sistem pengendalian internal, *whistleblowing*, kompetensi pegawai, dan moralitas individu dalam konteks pencegahan *fraud*. Penelitian ini dilakukan guna menganalisis pengaruh dari variabel-variabel tersebut terhadap upaya pencegahan *fraud* di BPKP Kalimantan Barat. Sistem pengendalian internal yang efektif, ditambah dengan implementasi *whistleblowing* yang didukung oleh kompetensi pegawai dan moralitas individu yang tinggi, diharapkan dapat menurunkan angka kecurangan.

Penelitian terdahulu masih memperlihatkan hasil yang belum konsisten terkait pengaruh *whistleblowing system* dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* (Inawati & Sabila, 2021; Anggraeni et al., 2021). Selain itu, kajian yang menguji peran moralitas individu sebagai variabel moderasi dalam konteks BPKP masih sangat terbatas. Penelitian ini menggunakan data primer dari pegawai BPKP Provinsi Kalimantan Barat dengan harapan dapat memberikan kontribusi empiris yang relevan sekaligus rekomendasi praktis untuk memperkuat sistem pencegahan *fraud* di sektor publik. Penelitian mengenai pengaruh pengendalian internal, sistem *whistleblowing*, dan kompetensi pegawai terhadap upaya pencegahan *fraud* telah banyak dilakukan, namun hasilnya belum konsisten. Jika Chairi et al. (2022) menyimpulkan bahwa kompetensi pegawai tidak berpengaruh signifikan, maka Suhartono et al. (2023) dan Kuntadi (2023) memperoleh hasil sebaliknya, yakni adanya pengaruh yang signifikan. Ketidakkonsistensi serupa juga ditemukan pada variabel *whistleblowing system*, di mana (Suasri et al., 2025) menyimpulkan tidak ada pengaruh signifikan dalam konteks pemerintahan desa, sementara (Riadi & Ardesti, 2024) justru menemukan pengaruh yang signifikan di lembaga audit pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas variabel-variabel tersebut sangat bergantung pada konteks organisasi dan lingkungan kelembagaan.

Sejauh ini, masih sedikit penelitian empiris yang secara khusus mengkaji bagaimana moralitas individu berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pengendalian internal, sistem *whistleblowing*, dan kompetensi pegawai terhadap upaya pencegahan *fraud*, dan temuan yang dihasilkan pun belum menunjukkan konsistensi. Anggoe & Reskino (2023) menunjukkan bahwa moralitas individu memiliki kemampuan untuk memperkuat hubungan tersebut, namun beberapa studi lain menunjukkan efek yang lemah atau tidak signifikan. Belum

adanya penelitian sejenis di lingkungan BPKP, khususnya di Kalimantan Barat, memperkuat urgensi penelitian ini untuk mengisi kekosongan literatur sekaligus memberikan bukti empiris baru dalam konteks pengawasan sektor publik. Penelitian ini memiliki kebaruan dari segi objek penelitian, yakni BPKP Provinsi Kalimantan Barat. Objek ini belum banyak dikaji dalam konteks pencegahan *fraud*, berbeda dengan studi sebelumnya yang lebih banyak difokuskan pada sektor perbankan (Anggoe & Reskino, 2023) maupun layanan kesehatan seperti rumah sakit (Suhartono et.al., 2023). Pemilihan BPKP sebagai objek penelitian memberikan kontribusi empiris baru dalam mengkaji upaya penguatan tata kelola dan pengawasan internal di sektor publik, terutama pada lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi strategis dalam pencegahan kecurangan.

Kebaruan juga terletak pada kombinasi variabel yang digunakan. Untuk menganalisis pencegahan kecurangan, penelitian ini mengkaji pengaruh tiga variabel independen, yakni pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan kompetensi pegawai, dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi. Studi sebelumnya seperti (Anggoe & Reskino, 2023) dan Suhartono et al. (2023) hanya meneliti sebagian dari variabel tersebut atau tidak mengkaji pengaruh moderasi moralitas individu secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menjelaskan determinan pencegahan *fraud* di sektor publik. Dari sisi metodologi, penggunaan perangkat lunak WarpPLS versi 8.0 menjadi salah satu aspek kebaruan yang signifikan. WarpPLS mampu menganalisis hubungan antar variabel dalam jumlah sampel yang relatif kecil serta dapat mengakomodasi hubungan non-linear, yang tidak dimungkinkan oleh SEM berbasis *covariance* seperti AMOS atau LISREL (Suhartono et al., 2023). Pendekatan ini relevan digunakan dalam penelitian yang hanya melibatkan 30 responden, sebagaimana kondisi dalam penelitian ini, serta memungkinkan pengujian variabel moderasi secara lebih akurat.

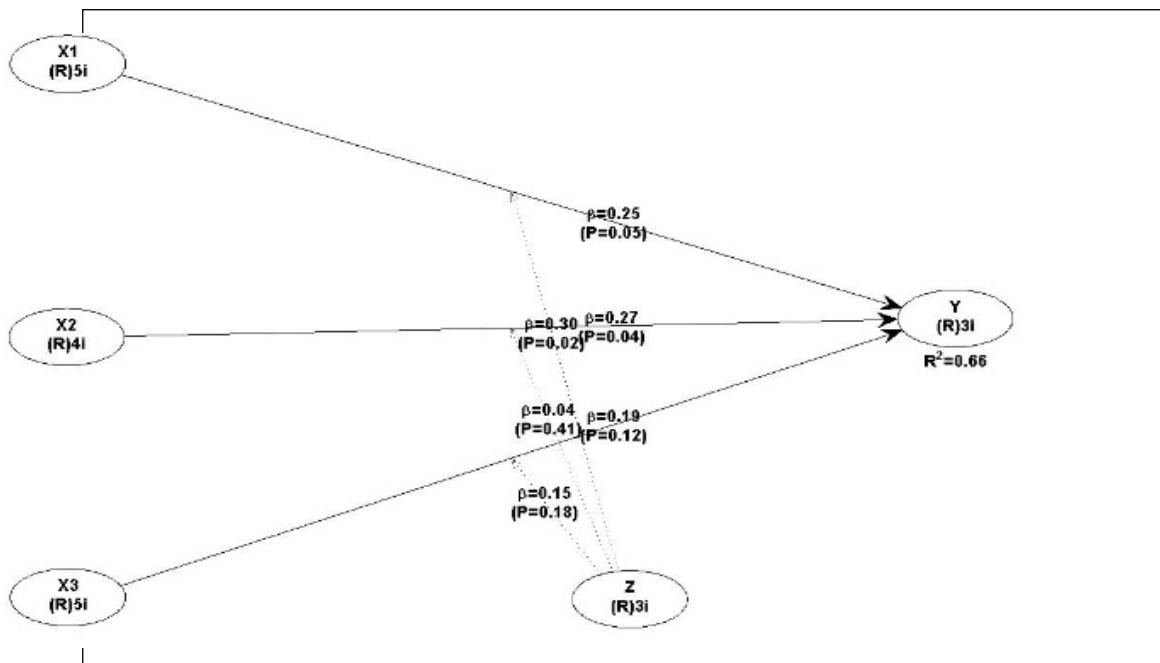
Penelitian ini mengkaji pengaruh pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan kompetensi pegawai terhadap pencegahan *fraud* di BPKP Provinsi Kalimantan Barat, dengan mengintegrasikan moralitas individu sebagai variabel moderasi. Pendekatan yang digunakan bersifat kuantitatif, dengan data diperoleh melalui instrumen kuesioner. Pengolahan data dilakukan dengan teknik regresi moderasi untuk menguji baik hubungan langsung antar variabel maupun pengaruh interaksinya. Kajian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara sistem pengawasan, kemampuan sumber daya manusia, dan nilai moral dalam mencegah terjadinya kecurangan. Moralitas individu dianalisis sebagai elemen yang berpotensi memperkuat maupun melemahkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Temuan dari studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang signifikan. Penelitian ini juga ditujukan untuk menyusun rekomendasi praktis bagi perbaikan sistem pengendalian *fraud*. Secara umum, fokus utama penelitian adalah memperkuat akuntabilitas dan integritas sektor publik.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan eksplanatif untuk mengkaji pengaruh pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan kompetensi pegawai terhadap pencegahan *fraud* sebagai variabel dependen. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis peran moralitas individu sebagai variabel moderasi yang berpotensi memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel tersebut. Lokasi penelitian ditetapkan di BPKP Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2025, mengingat lembaga ini memiliki peran strategis dalam pengawasan keuangan negara dan telah menerapkan sistem *whistleblowing*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup semua pegawai BPKP Kalimantan Barat yang memiliki keterlibatan dalam aktivitas pengawasan keuangan, dengan total sekitar 77 orang. Dari populasi tersebut, dipilih 36 orang sebagai sampel melalui metode *purposive sampling*, yaitu dengan memilih responden yang memiliki peran langsung dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan implementasi *whistleblowing system*, agar data yang diperoleh relevan dan mencerminkan kondisi nyata.

Penelitian ini memiliki variabel dependen yaitu pencegahan *fraud*, yang merupakan upaya organisasi dalam menghindari kecurangan melalui kebijakan dan pengawasan. Variabel independennya meliputi pengendalian internal, yaitu proses pengawasan dan pengelolaan risiko; *whistleblowing system*, yakni mekanisme pelaporan pelanggaran; serta kompetensi pegawai yang mencakup kemampuan dan keahlian kerja. Variabel moderasi berupa moralitas individu, yaitu nilai-nilai etika seperti kejujuran dan tanggung jawab. Seluruh variabel tersebut diukur berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 8 guna memperoleh data yang terstruktur dan dapat dianalisis secara kuantitatif. Tahapan analisis data diawali dengan uji validitas menggunakan analisis faktor konfirmatori (*confirmatory factor analysis*) untuk memastikan bahwa setiap indikator mampu merepresentasikan konstruk variabel secara tepat. Uji reliabilitas dilakukan melalui perhitungan nilai *Cronbach's Alpha* untuk menjamin konsistensi antar item dalam masing-masing variabel. Selanjutnya, evaluasi terhadap model pengukuran dilakukan dengan meninjau nilai loading factor dan nilai *average variance extracted* (AVE), sebagai ukuran sejauh mana indikator mencerminkan konstruk secara menyeluruh. Analisis terhadap model struktural dilakukan dengan melihat nilai *R-squared* ( $R^2$ ), yang menunjukkan besarnya kontribusi variabel bebas dan moderasi dalam menjelaskan variasi pencegahan *fraud*. Di samping itu, pengaruh moderasi moralitas individu juga dianalisis untuk mengetahui sejauh mana moralitas dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara pengendalian internal, *whistleblowing system*, serta kompetensi pegawai terhadap pencegahan *fraud* di lingkungan BPKP Kalimantan Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Kerangka Konseptual

### Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

#### Uji Validitas Diskriminan

Untuk memastikan validitas diskriminan konstruk, dilakukan pengujian dengan membandingkan akar AVE dan korelasi antar konstruk. Validitas diskriminan terpenuhi jika akar AVE lebih besar dari korelasi antar konstruk (Fornell & Larcker, 1981). Berikut hasil uji validitas diskriminan penelitian ini:

Tabel 1. Uji Validitas Diskriminan

	Y	X1	X2	X3	Z	Z*X1	Z*X2	Z*X3
Y	0.532 (0.789)	0.422	0.415	0.327	0.382	0.111	0.120	
X1	0.413	0.422 (0.804)	0.526	0.506	0.100	-0.164	-0.274	
X2	0.384	0.415	0.526 (0.886)	0.402	0.107	-0.271	-0.248	
X3	0.291	0.327	0.506	0.402 (0.824)	-0.048	0.008	0.013	
Z	(0.848)	0.532	0.413	0.384	0.291 (1.000)	0.467	0.170	0.233
Z*X1	0.467	0.382	0.100	0.107	-0.048 (1.000)	0.546	0.592	
Z*X2	0.170	0.111	-0.164	-0.271	0.008 (1.000)	0.546	0.699	
Z*X3	0.233	0.120	-0.274	-0.248	0.013 (1.000)	0.592	0.699	

Sumber: Output WarpPLS 8.0 (2025)

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai akar kuadrat AVE dari setiap konstruk lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi antara konstruk tersebut dan konstruk lainnya. Sebagai contoh, konstruk X2 memiliki nilai akar AVE sebesar 0.886, yang lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi tertingginya dengan konstruk lain, yaitu 0.526 (dengan X1). Pola ini juga berlaku pada konstruk lainnya, seperti Y (0.789 > 0.532), X3 (0.824 > 0.506), dan Z (0.848 > 0.532). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dalam model telah memenuhi kriteria validitas diskriminan, yang berarti bahwa masing-masing konstruk mampu merepresentasikan konsep yang berbeda secara konsisten tanpa terjadi tumpang tindih makna (Fornell & Larcker, 1981; Hair et al., 2019).

### **Uji Reliabilitas**

Sebelum menguji hubungan antar variabel, dilakukan uji reliabilitas untuk memastikan konsistensi pengukuran setiap konstruk. Reliabilitas dinilai melalui *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*, dengan nilai  $\geq 0,70$  dianggap memadai (Hair et al., 2019). Pengujian menggunakan WarpPLS, dan hasilnya disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Uji Reliabilitas**

Konstruk Penelitian	Composite Reliability	Cronbach's Alpha
Pengendalian Internal (X1)	0.891	0.847
Whistleblowing System (X2)	0.880	0.818
Kompetensi Pegawai (X3)	0.948	0.931
Moralitas Individu (Z)	0.863	0.759
Pencegahan Fraud (Y)	0.884	0.802

Sumber: *Output WarpPLS 8.0 (2025)*

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini memiliki tingkat konsistensi internal yang baik, dengan nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha* berada di atas ambang batas minimum 0,70. Nilai tertinggi ditemukan pada konstruk Kompetensi Pegawai ( $CR = 0,948$ ;  $\alpha = 0,931$ ), sementara nilai terendah tetap memenuhi syarat terdapat pada konstruk Moralitas Individu ( $CR = 0,863$ ;  $\alpha = 0,759$ ). Temuan ini mengindikasikan bahwa instrumen yang digunakan telah reliabel dan mampu mengukur konstruk secara konsisten, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Hair et al. (2019) dan Kock (2015).

### **Uji Multikolinearitas (Full Collinearity VIF)**

Uji multikolinearitas dilakukan untuk memastikan bahwa antar konstruk dalam model tidak terjadi hubungan yang terlalu tinggi yang dapat memengaruhi

hasil estimasi. Pengujian ini menggunakan indikator Full Collinearity VIF dari WarpPLS, di mana nilai  $VIF \leq 3,30$  menunjukkan tidak adanya multikolinearitas maupun bias metode umum (Kock & Lynn, 2012; Kock, 2015). Nilai-nilai tersebut disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3. Uji Multikolinearitas (Full Collinearity VIF)**

Pengendalian Internal (X1)	Whistleblowing System (X2)	Kompetensi Pegawai (X3)	Moralitas Individu (Z)	Pencegahan Fraud (Y)
1.662	2.122	1.836	1.751	1.811

Sumber: *Output WarpPLS 8.0 (2025)*

Berdasarkan hasil uji *Full Collinearity VIF*, seluruh konstruk dalam model penelitian memiliki nilai VIF di bawah ambang batas 3,30. Nilai VIF tertinggi terdapat pada konstruk *Whistleblowing system* sebesar 2,122, sedangkan nilai terendah terdapat pada konstruk Pengendalian Internal sebesar 1,662. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas antar konstruk dalam model. Selain itu, nilai VIF yang rendah juga menunjukkan bahwa model penelitian bebas dari *common method bias* (Kock & Lynn, 2012). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini memenuhi asumsi statistik terkait multikolinearitas dan layak untuk digunakan dalam analisis lanjutan.

#### **Uji Model Fit**

Untuk mengevaluasi kesesuaian dan validitas model penelitian, dilakukan pengujian terhadap beberapa indikator statistik utama seperti APC, ARS, AARS, AVIF, AFVIF, dan GoF. Tujuan pengujian ini adalah untuk memastikan model terbebas dari multikolinearitas serta memiliki kemampuan prediktif yang cukup, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Hair et al. (2017) dan (Tenenhaus et al., 2005). Berikut ini adalah hasil pengujian indikator-indikator tersebut:

**Tabel 4. Uji Model Fit**

Indikator	Nilai Uji	Hasil P-Value	Cut-off/Kriteria
Average path coefficient (APC)	0.199	< 0.050	< 0.05
Average R-squared (ARS)	0.656	< 0.001	< 0.05
Average adjusted R-squared (AARS)	0.585	< 0.001	< 0.05
Average block VIF (AVIF)	4.510	$\leq 5$	$\leq 5$
Average full collinearity VIF (AFVIF)	2.107	$\leq 5$	$\leq 5$
Tenenhaus GoF (GoF)	0.727	$\geq 0.1$	$\geq 0.1$

Sumber: *Output WarpPLS 8.0 (2025)*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh indikator model memenuhi kriteria yang disarankan. Nilai APC, ARS, dan AARS signifikan ( $p < 0,05$ ), yang mengindikasikan hubungan antar variabel cukup kuat. Nilai AVIF dan AFVIF berada di bawah batas  $\leq 5$ , menunjukkan tidak adanya multikolinearitas maupun *common method bias* (Kock, 2015). Selain itu, nilai GoF sebesar 0,727 menandakan bahwa model memiliki kecocokan yang sangat baik secara keseluruhan (Tenenhaus et al., 2005). Oleh karena itu, model ini dapat dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

### Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

#### Uji Koefisien Determinasi (*R-Square*)

*R-Square* digunakan untuk menunjukkan sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai yang lebih tinggi menandakan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang lebih baik. Hair et al. (2017) mengklasifikasikan nilai *R-Square* sebesar 0,75 sebagai kuat, 0,50 sebagai sedang, dan 0,25 sebagai lemah. Adapun nilai R-Square untuk variabel dependen dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi (*R-Square*)**

Variabel	R-Square
Pencegahan Fraud	0.656

Sumber: *Output WarpPLS 8.0 (2025)*

Nilai *R-Square* sebesar 0,656 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 65,6% variasi pada variabel Pencegahan *Fraud*. Berdasarkan kriteria Hair et al. (2017), nilai ini tergolong sedang hingga kuat, sehingga model dinilai cukup baik dalam memprediksi faktor-faktor yang memengaruhi pencegahan *fraud*.

#### Uji Hubungan Langsung

Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode *Partial Least Squares* (PLS) untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap dependen. Analisis fokus pada nilai path coefficient untuk kekuatan hubungan dan *p-value* untuk signifikansi statistik. *Effect size* juga dihitung untuk mengukur kontribusi variabel secara individual. Menurut Hair et al. (2017), hubungan signifikan jika *p-value*  $< 0,05$ . Hasil pengujian hipotesis berikut disajikan untuk penelitian ini:

**Tabel 6. Uji Hubungan Langsung**

Uji Hipotesis	Path Coefficients	Standard Error	Effect Size	P-value	Tingkat Signifikansi
Z → X1	0.305	0.145	0.194	0.022	Moderasi
Z → X2	0.038	0.164	0.007	0.408	TM Moderasi
Z → X3	0.145	0.156	0.053	0.179	TM Moderasi

Sumber: *Output WarpPLS 8.0 (2025)*

### **Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud**

Analisis terhadap variabel pengendalian internal ( $X_1 \rightarrow Y$ ) menunjukkan nilai  $p$  sebesar 0,049. Karena angka ini lebih kecil dari batas signifikansi 0,05 ( $0,049 < 0,05$ ), hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima. Ini menandakan bahwa pengendalian internal memiliki dampak langsung terhadap upaya pencegahan kecurangan. Koefisien jalur positif sebesar 0,253 mengindikasikan bahwa semakin optimal penerapan pengendalian internal, semakin efektif pencegahan kecurangan yang dilakukan. Sistem pengendalian internal yang baik dapat mengurangi kesempatan individu untuk melakukan tindakan kecurangan, sesuai dengan prinsip dalam *Fraud Triangle Theory*. Temuan ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Megawati & Reskino (2023) serta Suhartono et al. (2023), yang menunjukkan bahwa penerapan pengendalian internal yang kuat berkontribusi signifikan dalam mencegah terjadinya *fraud* di dalam organisasi.

### **Pengaruh Whistleblowing system terhadap Pencegahan Fraud**

Pada pengujian variabel *whistleblowing system* ( $X_2 \rightarrow Y$ ), diperoleh  $p$ -value sebesar 0,041. Karena nilai ini lebih kecil dari 0,05 ( $0,041 < 0,05$ ), hipotesis nol ditolak dan hipotesis kedua ( $H_2$ ) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sistem *whistleblowing* berperan langsung dalam mencegah kecurangan. Koefisien jalur yang positif sebesar 0,265 mengindikasikan bahwa semakin baik efektivitas *whistleblowing system*, semakin kuat pula upaya pencegahan kecurangan di organisasi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Megawati & Reskino (2023), yang menyimpulkan bahwa penerapan sistem *whistleblowing* memiliki kontribusi signifikan dalam upaya pencegahan *fraud* di bank-bank BUMN di Indonesia. Studi tersebut menekankan bahwa keberadaan *whistleblowing system* memberikan saluran pelaporan yang efektif, sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan dapat terdeteksi dan dicegah sejak dulu.

### **Pengaruh Kompetensi Pegawai terhadap Pencegahan Fraud**

Pengujian variabel kompetensi pegawai ( $X_3 \rightarrow Y$ ) menunjukkan  $p$ -value sebesar 0,116. Karena angka ini lebih besar dari 0,05 ( $0,116 > 0,05$ ), maka hipotesis nol diterima dan hipotesis ketiga ( $H_3$ ) ditolak. Dengan demikian, kompetensi pegawai tidak memberikan pengaruh langsung yang signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Meskipun koefisien jalur positif sebesar 0,186, pengaruh tersebut tidak

signifikan secara statistik dalam model ini. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Suhartono et al. (2023) mengungkapkan bahwa pegawai yang kompeten memiliki peran penting dalam mencegah kecurangan. Menurut *Fraud Triangle Theory* dari Cressey (1953), *fraud* muncul karena tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Kompetensi pegawai memengaruhi peluang, namun tanpa dukungan pengendalian internal yang memadai dan moralitas tinggi, kompetensi tidak menjamin pencegahan kecurangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nur'aini & Arismutia (2024), penelitian ini menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan di Inspektorat Daerah Kota Bandung. Meskipun kompetensi SDM dapat meningkatkan kesadaran terhadap *fraud*, penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi yang rendah tidak berdampak langsung pada pencegahannya, sehingga kemungkinan ada faktor lain yang lebih berpengaruh.

### **Uji Hubungan Tidak Langsung**

Uji moderasi dilakukan untuk menilai apakah variabel moderasi memengaruhi hubungan antara variabel bebas dan terikat. Efek moderasi dinyatakan signifikan jika nilai *p-value* kurang dari 0,05 (Hair et al., 2017). Berikut ini adalah hasil pengujian moderasi dalam penelitian ini:

**Tabel 7. Uji Hubungan Tidak Langsung**

Uji Hipotesis	Path Coefficients	Standard Error	Effect Size	P-value	Tingkat Signifikansi
Z → X1	0.305	0.145	0.194	0.022	Moderasi
Z → X2	0.038	0.164	0.007	0.408	TM Moderasi
Z → X3	0.145	0.156	0.053	0.179	TM Moderasi

Sumber: Out uput WarpPLS 8.0 (2025)

### **Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* yang Dimoderasi Moralitas Individu**

Hasil uji terhadap pengaruh variabel moderasi Z pada variabel X1 menunjukkan *p-value* sebesar 0,022. Karena nilai ini lebih kecil dari batas signifikansi 0,05 ( $0,022 < 0,05$ ), maka hipotesis nol yang menyatakan tidak ada pengaruh moderasi ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel Z berperan sebagai moderator yang signifikan terhadap X1. Koefisien jalur positif sebesar 0,305 menunjukkan bahwa keberadaan variabel moderasi Z memperkuat hubungan dengan variabel X1. Selain itu, *effect size* sebesar 0,194 mengindikasikan bahwa pengaruh moderasi ini cukup kuat. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Suasri et al., 2025), yang menunjukkan bahwa moralitas individu secara signifikan memperkuat keterkaitan antara sistem pengendalian internal dan upaya pencegahan kecurangan di lingkungan aparatur desa. Penelitian tersebut menegaskan bahwa

pembinaan nilai-nilai etika dan moral individu merupakan elemen penting dalam memperkuat efektivitas pengendalian internal.

### **Pengaruh *Whistleblowing system* Terhadap Pencegahan *Fraud* yang Dimoderasi Moralitas Individu**

Pada pengujian pengaruh moderasi Z terhadap variabel X2, diperoleh *p-value* sebesar 0,408. Karena angka ini lebih besar dari 0,05 ( $0,408 > 0,05$ ), maka hipotesis nol tidak dapat ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh moderasi yang signifikan dari variabel Z terhadap X2. Koefisien jalur sebesar 0,038 dengan *effect size* hanya 0,007 menunjukkan bahwa efek moderasi sangat kecil dan tidak signifikan secara statistik, sehingga variabel Z tidak memoderasi hubungan pada variabel X2. Temuan ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Isbandi dan Fauzihardani (2025) yang menunjukkan bahwa keberadaan *whistleblowing system* secara signifikan memperkuat kinerja pengendalian internal dalam upaya pencegahan *fraud* dengan menciptakan budaya organisasi yang lebih terbuka dan bertanggungjawab. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian (Nadia et al., 2024), hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas individu tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara *whistleblowing system* dan pencegahan *fraud*. Dengan kata lain, meskipun seseorang memiliki tingkat moralitas yang tinggi, hal tersebut tidak memengaruhi tingkat efektivitas sistem *whistleblowing* dalam mencegah terjadinya kecurangan.

### **Pengaruh Kompetensi Pegawai Terhadap Pencegahan *Fraud* yang Dimoderasi Moralitas Individu**

Untuk variabel X3, hasil uji menunjukkan *p-value* sebesar 0,179. Karena nilai ini lebih besar dari 0,05 ( $0,179 > 0,05$ ), maka hipotesis nol diterima, sehingga variabel moderasi Z tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap X3. Koefisien jalur positif sebesar 0,145 dengan *effect size* 0,053 mengindikasikan bahwa meskipun ada pengaruh moderasi, dampaknya kecil dan tidak signifikan secara statistik dalam konteks model ini. Temuan ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Suhartono et al. (2023) menyatakan bahwa pegawai yang kompeten memainkan peran kunci dalam memaksimalkan kinerja pengendalian internal guna meminimalkan risiko terjadinya *fraud*. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian oleh (Wonar et al., 2018) menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi aparatur desa dan ketaatan dalam pelaporan keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, sensitivitas moral tidak terbukti memperkuat hubungan antara kompetensi aparatur desa dan pencegahan *fraud* sebagai variabel moderasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan kompetensi pegawai terhadap pencegahan *fraud*, dengan mempertimbangkan moralitas individu sebagai variabel moderasi. Studi ini dilaksanakan di BPKP Provinsi Kalimantan Barat dengan melibatkan 36 responden yang dipilih secara *purposive*, serta dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif melalui perangkat lunak WarpPLS 8.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal dan *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*, yang menegaskan bahwa keberadaan sistem pengawasan dan pelaporan yang efektif menjadi elemen fundamental dalam upaya mitigasi risiko *fraud* di sektor publik.

Sebaliknya, kompetensi pegawai tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Temuan ini mengindikasikan bahwa kapabilitas teknis dan profesionalisme pegawai belum tentu berdampak langsung pada upaya pencegahan *fraud* tanpa dukungan sistem pengawasan dan nilai moral yang kuat. Selanjutnya, moralitas individu terbukti memoderasi secara signifikan hubungan antara pengendalian internal dan pencegahan *fraud*, yang menunjukkan bahwa integritas pribadi dapat memperkuat efektivitas mekanisme pengawasan internal. Namun, moderasi moralitas individu tidak signifikan dalam hubungan *whistleblowing system* dan kompetensi pegawai terhadap pencegahan *fraud*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sinergi antara sistem formal dan karakter individu berperan penting dalam menciptakan lingkungan organisasi yang berintegritas dan bebas dari kecurangan. Implikasi teoritis dari penelitian ini memperkaya literatur terkait determinan pencegahan *fraud* di sektor publik, terutama dalam mengkaji peran moralitas sebagai variabel moderasi.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar BPKP Provinsi Kalimantan Barat meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan optimalisasi sistem *whistleblowing* dengan memastikan aksesibilitas, perlindungan terhadap pelapor, serta tindak lanjut laporan yang akuntabel. Peningkatan kapasitas pegawai sebaiknya tidak hanya difokuskan pada aspek teknis, tetapi juga mencakup penguatan nilai-nilai etika dan integritas melalui pelatihan dan internalisasi budaya organisasi yang berorientasi pada akuntabilitas publik. Meskipun kompetensi tidak berpengaruh langsung terhadap pencegahan *fraud* dalam konteks penelitian ini, pembinaan kompetensi tetap diperlukan untuk mendukung peran strategis pegawai dalam pengawasan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar memperluas ruang lingkup penelitian, baik secara geografis maupun institusional, serta mempertimbangkan variabel tambahan seperti kepemimpinan etis, tekanan

organisasi, dan budaya kerja, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pencegahan *fraud*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggoe, M., & Reskino, R. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal, *Whistleblowing system*, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(1), 31–50.
- Anggraeni, N. M., Sailawati, S., & Malini, N. E. L. (2021). Pengaruh *Whistleblowing system*, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan Keadilan Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 14(1), 85–92.
- Carmenita, J. (2017). *Pemeriksaan operasional atas pengendalian internal untuk mendukung kualitas produksi: studi kasus pada PT. Angkasa Putra*.
- Chairi, N., Indriani, M., & Darwanis, D. (2022). Kompetensi, Moralitas Dan Sistem *Whistleblowing* Dalam Pencegahan *Fraud*: Studi Empiris Pada Organisasi Pemerintahan Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 22(1), 119–142.
- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of Marketing Research*, 18(1), 39–50.
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24.
- Inawati, W. A., & Sabila, F. H. (2021). Pencegahan *fraud*: pengaruh *whistleblowing system*, government governance dan kompetensi aparatur pemerintah. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(3), 731.
- Isbandi, A., & Fauzihardani, E. (2025). Pengaruh *Whistleblowing system* dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* dengan Moralitas Individu sebagai Variabel Moderasi. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 7(1), 1–15.
- Kock, N. (2015). Common method bias in PLS-SEM: A full collinearity assessment approach. *International Journal of E-Collaboration (Ijec)*, 11(4), 1–10.
- Kock, N., & Lynn, G. S. (2012). Lateral collinearity and misleading results in variance-based SEM: An illustration and recommendations. *Journal of the Association for Information Systems*, 13(7), 2.
- Kohlberg, L., & Kramer, R. (1969). Continuities and discontinuities in childhood and adult moral development. *Human Development*, 12(2), 93–120.

- Kuntadi, C. (2023). *Audit Internal Sektor Publik*. Penerbit Salemba.
- Mardianto, M., & Tiono, C. (2019). Analisis pengaruh *fraud triangle* dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. *Jurnal Benefitia*, 1(1), 87.
- Nadia, D., Muhsin, M., & Heniawati, E. (2024). PENGARUH WHISTLEBLOWING SYSTEM & PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD, MORALITAS INDIVIDU SEBAGAI MODERATOR. *J-AKSI: JURNAL AKUNTANSI DAN SISTEM INFORMASI*, 5(3), 314–323.
- Nur'aini, L., & Arismutia, S. A. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, *Whistleblowing system*, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Pada Inspektorat Daerah Kota Bandung). *ECo-Buss*, 6(3), 1458–1470.
- Rahmawati, A., & Kuntadi, C. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendektsian *Fraud*: Kompetensi, Profesionalisme dan Pengalaman Audit (Literature Review Audit). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 4(1).
- Riadi, S., & Ardesti, F. (2024). Enhancing *Fraud Prevention*: The Impact of *Whistleblowing*, Internal Controls, Leadership, and Organizational Culture. *Sixth International Conference on Applied Economics and Social Science (ICAESS 2024)*, 475–486.
- Siregar, A., & Surbakti, A. S. (2019). Analisis Pengaruh *Whistleblowing system* dan Rapat Komite Audit terhadap Jumlah Kecurangan. *BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Keuangan*, 16(1), 21.
- Suasri, E., Rininda, B. P., Amelia, N., Lestari, A., Amelia, D., & Utami, V. A. (2025). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, *Whistleblowing system* terhadap Pencegahan *Fraud* dengan Moralitas Individu sebagai Variabel Moderasi. *Monex: Journal of Accounting Research*, 14(1), 21–35.
- TAHANG, A., & Majid, J. (2023). Pengaruh Kompetensi Pegawai dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* dengan Moralitas Individu sebagai Variabel Moderasi. *ACCOUNTIA JOURNAL (Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)*, 7(01), 18–35.
- Tenenhaus, M., Vinzi, V. E., Chatelin, Y.-M., & Lauro, C. (2005). PLS path modeling. *Computational Statistics & Data Analysis*, 48(1), 159–205.
- Wonar, K., Falah, S., & Pangayow, B. J. C. (2018). Pengaruh kompetensi aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan dan sistem pengendalian intern terhadap pencegahan *fraud* dengan moral sensitivity sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi, Audit, Dan Aset*, 1(2), 63–89.